

ISSN: 0216-0243

JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

Th. XXXII no.3/ 2011

FILSAFAT PANCASILA



JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

FILSAFAT PANCASILA

Daftar Isi

Pengantar redaksi	1
Peta Permasalahan Pancasila Dewasa Ini ANTONIUS WIDYARSONO	5
PANCASILA: Makna dan Tantangannya sebagai Dasar Negara BENYAMIN SAM	17
Pendidikan bagi Kepribadian Bangsa Indonesia ANDREAS YAN	29
Hubungan Agama dan Negara dalam Pandangan Sila Pertama Pancasila SIPRIANUS S. SAGOROUJOU	39
Kebebasan Ahmadiyah dalam Kacamata Pancasila I. V. EKO ANGGUN S	53
Pancasila dan Masalah Multikulturalisme YUDI PRIYANTO	69
Multikulturalisme dalam Masyarakat Plural DOMINGGUS ARIANTO BERE DINA	83
Demokrasi dan Pemilu Indonesia LAMBERTUS BERTO TUKAN	95
ARTIKEL LEPAS:	
SEMAR: Kebijakan Hidup Jawa YOHANES DAMASCENUS ANUGRAHBAYU	107
AIDS Drug as an Unregulated Commodity: Unravelling the Limits of the Current Patent Laws H. ANGGA INDRASWARA	123

Demokrasi dan Pemilu Indonesia

LAMBERTUS BERTO TUKAN¹

Abstrak: Pemilu merupakan perwujudan nyata demokrasi. Karena itu, untuk mengenali dan memahami demokrasi, Pemilu mesti dilihat sebagai tonggak demokrasi. Secara khusus, demokrasi di Indonesia dapat dicermati lewat rangkaian pengalaman pemilu yang pernah dilakukan. Tulisan ini mau melihat Pemilu 1955, sebagai pemilu pertama, dan 1999 untuk menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia. Uraian akhir yang ingin ditunjukkan adalah kecenderungan sifat dekaden dari demokrasi di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Demokrasi *Anschenden*, Demokrasi Dekaden, Indonesia

Demokrasi politik itu, yang berarti kesamaan hak di lapangan politik, akan tetap satu demokrasi borjuis manakala tidak dilengkapi dengan kesamarataan di lapangan ekonomi.” (Sukarno)²

Pendahuluan

Demokrasi representatif di mana saja, pun di Indonesia, mendapatkan perayaan dan bentuk paling baik dalam penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, ketika membicarakan demokrasi representatif kita mesti berpaling pada peristiwa Pemilu, saat semua warga negara menggunakan hak pilihnya sebagai wujud keterlibatan politik dan bernegara. Pemilu bukan peristiwa asing di Indonesia. Tercatat sampai sekarang, Indonesia telah mengadakan sepuluh kali Pemilu. Artinya, Indonesia sudah melaksanakan sepuluh kali momen demokrasi. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Pemilu yang sudah diadakan itu benar-benar Pemilu yang merepresentasikan paham demokrasi sesungguhnya? Mengenai Pemilu, Ignas Kleden menulis

demikian:

“Pemilu merepresentasikan hak rakyat untuk menentukan sistem pemerintahannya, tetapi pelaksanaan Pemilu tidak dengan sendirinya mewujudkan hak rakyat tersebut (misalnya karena penggunaan pemaksaan dalam pemberian suara, atau karena rakyat dipikat dengan sejumlah uang sogok untuk mendapatkan suara yang diinginkan).”³

Dalam tulisan ini, dengan menyadari Pemilu sebagai lembaga, ruang untuk nilai-nilai demokrasi ditanamkan dan peristiwa yang memungkinkan seluruh warga Indonesia menggunakan hak pilihnya, akan dibahas dua Pemilu, Pemilu 1955 dan 2009.⁴ Dari pembahasan tersebut diharapkan muncul panorama Pemilu sebagai wujud demokrasi di Indonesia. Dari sana, kita bisa melihat, sejauh mana demokrasi di Indonesia dijalankan. Selanjutnya, tulisan ini menawarkan rekomendasi tentang demokrasi. Pada bagian terakhir, penulis akan mengutarakan ide demokrasi menurut pemikir Jacques Ranciere.

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi berasal dari kebudayaan Yunani Kuno, tepatnya Polis Athena. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demokratia*, pemerintahan (*kratia*) oleh rakyat (*demos*).⁵ Solon adalah orang pertama yang menetapkan undang-undang yang bersifat demokratis di Polis Athena, penghapusan hutang dan perbudakan. Lantas pada zaman pemerintahan Clisthenes (508-5-7 SM) terbentuklah anggota perwakilan *boule* (semacam dewan perwakilan) yang menggunakan sistem pengundian.⁶ Inilah bentuk kesederajatan di depan hukum.

Bentuk demokrasi purba dari Yunani Klasik ini menjadi cikal bakal bentuk negara demokrasi negara-negara modern saat ini, termasuk Indonesia. Semangat dan ide untuk membentuk sebuah negara Indonesia dengan asas demokrasi sudah terlihat pada perjuangan awal kemerdekaan Indonesia. Paham ini pun muncul dari pergaulan para intelektual pejuang kemerdekaan dengan teori-teori politik barat. Sukarno dalam Pidato Pembelaan di depan Hakim Kolonial menulis demikian:

Semangat dan ide untuk membentuk sebuah negara Indonesia dengan asas demokrasi sudah terlihat pada perjuangan awal kemerdekaan Indonesia.

“Kemerdekaan nasional usahakanlah, sebab baru dengan kemerdekaan nasional itulah rakyat akan bisa memperbaiki rumah tangganya *dengan tidak terganggu*, yakni dengan sesempurna-sempurnanya”,...⁷

Dari pernyataan di atas, kita menemukan sebuah semangat demokrasi, khususnya pada kalimat, “rakyat akan bisa memperbaiki rumah tangganya”. “Rumah tangga” kita pahami sebagai negara, tanah air.

Semakin jelas bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ketika kita membaca UUD 1945 pasal 27 tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum, pemerintahan, dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.⁸ Kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan ini menunjukkan demokrasi. Namun, Indonesia hendak mencari bentuk demokrasi sendiri yang sesuai dengan kebudayaan dan lingkungan khas negeri ini. Hal ini terlihat dalam ucapan Sukarno:

“Apakah demokrasi itu? Demokrasi adalah ‘pemerintahan rakyat’. Tjara pemerintahan ini memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah. Tjara pemerintahan ini sekarang menjadi tjita-tjita semua partai nasionalis Indonesia. Tetapi, dalam mentjita-tjitakan faham dan tjara-pemerintahan demokrasi itu, kaum Marhaen toch harus berhati-hati. Artinya: djangan meniru sahaja ‘demokrasi-demokrasi’ yang kini dipraktikkan di dunia luaran...”

Dalam perjalanan waktu, demokrasi di Indonesia mengalami perubahan-perubahan. Kita pernah mengenal demokrasi liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), dan demokrasi pancasila di zaman Soeharto. Setelah kejatuhan rezim Soeharto, Indonesia memasuki sebuah demokrasi yang tidak jelas bentuknya.¹⁰ Dari demokrasi yang tak jelas bentuknya ini, Indonesia mengalami tiga kali Pemilu yang multipartai yang membingungkan masyarakat.

Pemilu di Indonesia

Pemilu diatur dalam UUD 1945 Pasal 22E. Dibandingkan dengan lembaga-lembaga kenegaraan atau politik lain di Indonesia, Pemilu lebih merepresentasikan nilai-nilai demokrasi. Dalam Pemilu, semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi prasyarat, bisa menggunakan hak suaranya. Di bawah ini, penulis akan memaparkan dua pemilu yang pernah terjadi di Indonesia, Pemilu 1955 dan 2009. Pemilu pertama adalah pemilu sulung dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia dan kedua adalah pemilu bungsu Indonesia.

Namun, Indonesia hendak mencari bentuk demokrasi sendiri yang sesuai dengan kebudayaan dan lingkungan khas negeri ini.

a. Pemilu 1955

Banyak orang berpendapat Pemilu 1955 adalah Pemilu paling demokratis yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam pengantar, buku terjemahan *Pemilu 1955* karya Herbert Feith, penerbit buku mengungkapkan bahwa Pemilu 1955 adalah Pemilu paling “luber” dan “jurdil” dibandingkan dengan enam pemilu lain.¹¹ Pemilu ini menjadi tanggung jawab bersama, negara, partai politik, dan masyarakat sebagai pengawas.¹² Keadaan ini disebabkan belum ada sebuah lembaga khusus (misalnya KPU dan Panwaslu yang kita kenal sekarang) untuk menyelenggarakan Pemilu. Dengan demikian, kita melihat di dalam Pemilu 1955, masyarakat tidak hanya peserta atau pemilih saja yang datang ke TPS, mencoblos, lantas pulang kembali, tetapi juga terlibat sebagai panitia. Pemilu 1955 benar-benar menjadi pesta rakyat, disiapkan, dan dijalankan oleh rakyat. Pemilu 1955 sudah meminimalisir kecurangan-kecurangan. Kepanitiaan yang melibatkan semua partai peserta pemilu dan menjadikan masyarakat sebagai pengawas, membuat panitia tersebut saling mengawasi satu sama lain. Pemilu ini berbeda dengan pemilu masa Orba yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan karakter yang mengikuti garis komando Soeharto.¹³

Penyelenggaraan Pemilu 1955, dalam catatan Herbert Feith, berjalan dengan lancar dan peraturan-peraturan mengalami penyesuaian dalam praktiknya. Namun, semua perubahan itu tetap mengikuti instruksi pusat.¹⁴ Herbert Feith mencatat pemilu pertama Indonesia diikuti oleh lebih dari 80% pemilih tercatat. Kita melihat antusiasme masyarakat saat itu memang tinggi sekali.

b. Pemilu 2009

Sama seperti Pemilu 1955, Pemilu 2009 pun multipartai. 34 Partai Politik ambil bagian dalam Pemilu terbungsu di Indonesia ini. Dalam Pemilu 2009 ini, selain keikut-sertaan pemilih yang terbilang kecil, (Pemilu 2009 mencatat banyak pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya) banyak kalangan menilai pemilu ini meninggalkan sebuah cacat yang menciderai demokrasi. Sebagai contoh, penilaian dari Tim Advokasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, mengatakan ada indikasi pelanggaran yang dilakukan langsung oleh KPU. Temuan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun mensinyalir adanya pelanggaran dalam daftar pemilih tetap. Tercatat pula oleh kelompok yang sama adanya pelanggaran hukum atas Pasal 29 ayat 5 UU 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. KPU pun melakukan penghilangan atas 63.700 unit TPS.¹⁵

Pemilu 2009 diwarnai oleh beragam foto caleg yang mewujud dalam berbagai bentuk, seperti stiker, kartu, kalender, spanduk, banner, iklan tv, dan iklan surat kabar. Tentu saja semua gambar wajah mereka diikuti beragam visi misi yang mencolok dengan warna-warni stiker, poster atau pun spanduk. Situasi semacam ini disebut sebagai “parade sopisme” oleh A. Setyo Wibowo.¹⁶ Kaum Sopis adalah mereka yang mengajarkan cara berbicara dengan baik, memunculkan gaya bicara yang mengesankan namun bukan untuk mencari kebenaran tetapi untuk mengalahkan atau memesona lawan bicara.

Terlihat bagaimana para caleg “bermain-main” dalam peristiwa demokrasi kita. Dengan berbagai cara dan pencitraan, mereka berusaha menjadi yang “terbaik” di mata publik. Padahal, dalam Pemilu, rakyat akan memilih yang dikenal. Tentu idealnya yang dikenal di sini adalah visi dan misi caleg, bukan wajah dan nama yang terpatri.

Sisi lain yang patut dicatat dari pemilu 2009 adalah hampir semua media massa elektronik mengamini pemenang Pemilu 2009 berdasarkan hasil survey dari beberapa lembaga survey yang melakukan penghitungan cepat waktu itu. Dengan cara pengungkapan sedemikian rupa, media-media massa, tanpa menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU, menetapkan pemenang Pemilu versi lembaga survey sebagai pemenang Pemilu. Masih soal media massa elektronik dan cetak, pasca pemboman J.W. Marriot dan Ritz Carlton, mereka sibuk dengan pemberitaan soal teroris. Padahal, di waktu yang sama, Mahkamah Konstitusi sedang mengadakan persidangan tentang sengketa pemilu. Dengan tidak memberitakan perkara Pemilu dan sibuk dengan berita penangkapan teroris, media massa telah mencabut pemilu sebagai wacana publik dari tengah perbincangan publik.

Sebagian kaum intelektual negeri ini pun berperan dalam kecacatan Pemilu 2009. Banyak dari mereka menjadi pembicara dalam acara-acara *talkshow* Pemilu di televisi yang membawa Pemilu pada perkara sekadar perebutan kekuasaan, jatah kursi di DPR dan bukan perkara demokrasi dan hak suara rakyat. Dalam *talkshow-talkshow* Pemilu di televisi, pembicaraan soal suara rakyat hampir jarang kita terdengar.

Rocky Gerung, misalnya, mempermasalahkan pihak yang marah dan memperkarakan kecurangan-kecurangan Pemilu. Menurutnya,

Demokrasi bukan soal yang kalah menerima kekalahannya dan yang menang menduduki jabatan, tetapi bagaimana rakyat bisa mengurus negara sendiri, terlibat aktif dan merasa sebagai bagian dari negara yang demokratis itu.

protes pada hasil Pemilu demikian hanya sekadar kemarahan politik yang diakibatkan kekecewaan karena kalah.¹⁷ Di satu sisi, kritiknya ini benar. Namun, perlu juga mendorong pengusutan perkara-perkara Pemilu, agar hak pilih masyarakat tidak dicerai dalam pemilu. Demokrasi bukan soal yang kalah menerima kekalahannya dan yang menang menduduki jabatan, tetapi bagaimana rakyat bisa mengurus negara sendiri, terlibat aktif dan merasa sebagai bagian dari negara yang demokratis itu.

c. Wujud Demokrasi dalam Dua Pemilu

Dua pemilu yang berbeda ini menunjukkan perkembangan penghayatan dan pemahaman demokrasi bangsa ini. Semakin tua bangsa ini, setidaknya-tidaknya sampai sekarang, semakin melemah pula artikulasi atas nilai-nilai demokrasi yang merupakan kerangka kehidupan berbangsanya. Tentu hal ini tidak terjadi begitu saja. Kita bisa melihat beberapa aspek yang berpotensi sebagai penyebab.

Ø Masa Awal Pasca Kemerdekaan sebagai Euforia Kehidupan Bernegara

Pada tahun 1955, warga Indonesia yang berumur di atas 20 tahun masih punya ingatan kuat mengenai masa revolusi kemerdekaan. Imajinasi tentang bangsa yang terjajah oleh kaum imperialis masih sangat kental. Kemerdekaan yang dicapai dengan susah payah masih merupakan *holly grail*¹⁸ bagi bangsa Indonesia saat itu. Karena itu usaha rakyat untuk mengurus rumah tangganya ditanggapi dengan penuh antusias. Pemilu, sebagai sarana menuju kehidupan bernegara yang lebih baik dalam *zeitgeist* semacam ini, mendapat tempat yang istimewa. Kisah semacam ini tidak ditemukan dalam Pemilu 2009.

Ø Pasar Kapitalis di Indonesia yang Masih Lemah

Tahun 1955, secara internasional, masih ditandai perang dingin. Saat itu dunia tidak didominasi satu sistem pasar seperti sekarang ini. Indonesia tidak mau memihak pada salah satu sistem tertentu yang diwakili NATO dan Pakta Warsawa. Indonesia terkenal dengan kebijakan luar negeri Non Blok. Apa dampaknya untuk sebuah pemilu yang baik? Kebijakan luar negeri seperti itu mengakibatkan tak ada satu sistem atau ideologi tertentu yang diusung partai-partai peserta pemilu menjadi dominan, mengakibatkan modal belum memegang peranan penting dalam politik. Sejak Soeharto

membuka Indonesia untuk investor-investor asing di tahun 1970-an, persoalan-persoalan modal mulai menjadi penting di Indonesia. Bukan berarti sebelumnya tidak ada, tetapi sebelumnya relatif lebih kecil. Pada Pemilu 2009, Indonesia praktis sudah menjadi bagian dari pasar liberal yang menjurus ke fundamentalisme pasar. Modal, kemudian, menjadi segala-galanya. Karena itu, banyak orang berpolitik membutuhkan modal. Maka, orang-orang yang tidak bermodal, dilarang dan tidak bisa berpolitik. Mereka mencari modal ke sana ke mari untuk berpolitik, dengan tujuan bila berhasil menjadi wakil rakyat pinjaman itu akan dikembalikan beserta bunganya.

Ø **Kemunculan Mass Media Elektronik**

Pada 1955, televisi belum menjamur di Indonesia. TVRI baru muncul sesudahnya. Sedangkan televisi-televisi swasta mulai muncul tahun 1990-an awal. Dengan demikian, pembentukan opini publik secara masif, efektif, dan relatif cepat tidak bisa dilakukan semudah sekarang. Akibatnya, modal belum memegang peranan benar dalam kampanye politik. Kampanye politik termutakhir yang terlihat di Pemilu 2009 adalah iklan televisi yang menunjukkan siapa bermodal banyak lebih mungkin untuk tampil dengan kemasan lebih baik dan sering di televisi.

Ø **Perubahan Tujuan Berpolitik**

Berpolitik pada Pemilu 1955 berada dalam semangat rakyat mengatur rumah tangga sendiri. Politik atau keikutsertaan dalam pemilu dilandaskan pada semangat yang kuat untuk membangun bangsa. Pada Pemilu 2009, penekanan itu sudah bergeser. Berpolitik bukan lagi kesempatan untuk ikut berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan jalan mencari nafkah. Dengan tingkah laku politisi seperti ini, terciptalah jarak antara politisi (wakil rakyat) dengan rakyat yang diwakili. Karena itu, kita bisa memahami, kenapa begitu banyak rakyat Indonesia tidak mau menggunakan hak suaranya. Bahkan mereka sudah tidak peduli dan tidak tahu menahu lagi soal hak suara.

Kembali ke Demokrasi yang Radikal

Apakah dengan melihat demokrasi kita yang semakin dekaden itu, kita lantas tak percaya lagi pada demokrasi? Pertanyaan ini mungkin tak perlu kita jawab secara terburu-buru. Demokrasi adalah bentuk terbaik dari yang

Karena itu, demokrasi bukan hanya sekedar landasan atau tatanan hidup bernegara, melainkan juga mewujudkan dalam perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan emansipasi.

terburuk yang ada di dunia saat ini. Percaya pada demokrasi, meskipun secara real kita melihat ketidakmampuan dan kemundurannya, masih merupakan jalan yang patut untuk diikuti. Jacques Rancière, filsuf Perancis kontemporer yang dikenal karena profokasi Goenawan Mohamad dalam Orasi Ilmiah untuk Nurcholis Madjid Memorial Lecture, adalah salah seorang pemikir yang mengajak kembali pada akar demokrasi sesungguhnya.

Ranciere berpendapat bahwa kesetaraan sebagai nilai utama demokrasi adalah sesuatu yang sudah diandaikan ada meskipun sering dilupakan. Dengan demikian, masih menurut Ranciere, yang politik itu merupakan sebuah pergulatan terus-menerus yang diinsiprasikan oleh kesetaraan itu sendiri.¹⁹ Ranciere berpendapat juga bahwa mereka yang mengkritik demokrasi karena pemimpin-pemimpin yang dilahirkan demokrasi itu adalah orang-orang yang kurang “baik” dan kurang “mampu”. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menerima demokrasi karena demokrasi memungkinkan siapa saja untuk menjadi pemimpin. Mengikuti konsep kesetaraan Ranciere sungguh sulit, apalagi mengikuti sistem perwakilan atau pemimpin dengan cara melempar dadu yang diajukannya berdasarkan pada zaman Yunani Kuno, sungguh sulit. Namun, bila kesetaraan ini menjadi pegangan dalam berdemokrasi dan setiap orang diberi kesempatan, Ranciere dapat menjawab problem demokrasi di Indonesia.

Ketika demokrasi (pemilu) mengandaikan mereka yang bermodal saja yang mampu terlibat, dengan kesetaraan a la Ranciere, demokrasi atau Pemilu dibuat sedemikian rupa sistemnya sehingga tidak ada cela ketidaksetaraan modal. Secara praktis hal ini tentu akan sangat susah. Bagaimana mungkin ini bisa dimaklumi oleh media massa, jika pada saat yang sama penghasilan mereka berasal dari iklan Partai Politik atau individu caleg? Di sisi lain, Ranciere mengingatkan kita pada fondasi utama demokrasi, yaitu kesetaraan. Kesetaraan bisa menjadi semacam *tipe ideal* a la Max Weber. Namun, dengan *tipe ideal* ini, ada pegangan untuk kita dalam melangkah. Dengan memahami dan mengandaikan adanya “kesetaraan” sebagai fondasi utama kehidupan bernegara, kita dimungkinkan untuk menjadikan politik dan Pemilu sebagai sebuah perjuangan terus menerus demi mencapai kesetaraan. Karena itu, demokrasi bukan hanya sekedar landasan atau tatanan hidup bernegara, melainkan juga mewujudkan dalam perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan

emansipasi. Bukan karena kesetaraan dan emansipasi begitu susah dan mahal, tetapi karena kesetaraan dan emansipasi selalu ada dalam gerak itu sendiri.

Catatan Akhir

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara.
- 2 Sebagaimana dikutip oleh Yudi Latif, “Requiem Dini, Krisis Finansial dan Krisis Demokrasi”, *Prisma* No. 1, Vol. 28, Juni 2009, 15.
- 3 Ignas Kleden, “Memperkuat Masyarakat Sipil dengan Keseluruhan untuk Mengelola Negara dan pasar Lebih Baik”, (Makalah disampaikan saat Pidato Kebudayaan di Graha Bakti Budaya, 10 November 2009), 20.
- 4 Pemilu di zaman Orde Baru tidak dibahas di sini karena hampir semua sepakat bahwa, Pemilu pada zaman itu jauh dari demokrasi dan dua Pemilu zaman reformasi lainnya tidak dibahas pula karena pertimbangan bahwa Pemilu 2009 cukup untuk mewakilinya.
- 5 Lih. O. Notohamidjojo, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), 53.
- 6 Lih. A. Setyo Wibowo, “Merenungkan makna sila ke-4: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” (makalah disampaikan pada kuliah Pancasila: Demokrasi, STF Driyarkara 11 November 2009), 6-7.
- 7 Soekarno, *Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno Dimuka Hakim Kolonial* (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia), 96.
- 8 Diunduh dari <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22>, (diunduh 11 November 2009).
- 9 Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* (1965), sebagaimana dikutip Budiman Tanuredjo, “Melongok Demokrasi Indonesia”, *Kompas*, 16 Agustus 2007.
- 10 Tanuredjo, “Melongok Demokrasi Indonesia”.
- 11 Buku Herbert Feith edisi Bahasa Indonesia ini terbit pada tahun 1999, sebelum Pemilu 7 Juni 1999. Jadi, dengan menerbitkan buku tersebut, penerbit mengharapkan bisa menjadi pelajaran untuk sebuah Pemilu 1999 yang baik. Lih. Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, diterjemahkan oleh Nugroho Katjasungkana, Masri Maris, dan Parakitri T. Simbolon (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), vii.
- 12 Feith, *Pemilihan Umum 1955*, 1.
- 13 Oleh Frans Magnis-Suseno, dengan mengikuti analisis Mancur Olson, Soeharto dijuluki sebagai “bandit tidak mengembara” yang mana akan berusaha sedemikian sehingga sumber jarahannya tetap lestari. Lih. Frans Magnis-Suseno, *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 54-55.
- 14 Feith, *Pemilihan Umum 1955*, 61-62.
- 15 <http://www.pemiluindonesia.com/pemilihan-presiden/inilah-cacat-kpu-versi-tim-mega-pro.html>, (diunduh 11 November 2009).
- 16 A. Setyo Wibowo, “Irasional namun Efektif”, *Kompas*, 20 Januari 2009.
- 17 Rocky Gerung, “Intelektual dan Kondisi Politik”, *Prisma*, No. I, Vol. 28, Juni 2009,

70.

- 18 *Holly Grail* adalah ungkapan oleh bangsa Eropa, terutama di abad pertengahan. Ungkapan ini merujuk pada sesuatu yang sangat berharga, sangat mahal, sangat tinggi nilainya dan untuk mendapatkannya dibutuhkan sebuah kerja keras yang besar dan membutuhkan pula kesabaran serta pengorbanan tertentu.
- 19 A. Setyo Wibowo, “Kesetaraan Sebagai Presuposisi La Politique” (Makalah yang disampaikan pada diskusi buku *Demokrasi dan Kekecewaan* di Salihara, Pasar Minggu, 13 Mei 2009).

Daftar Pustaka

- Gerung, Rocky. “Intelektual dan Kondisi Politik”. *Prisma*, No. I, Vol. 28, Juni 2009.
- Herbert, Feith. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, diterjemahkan oleh Nugroho Katjasungkana, Masri Maris, dan Parakitri T. Simbolon. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.
- Kleden, Ignas. “Memperkuat Masyarakat Sipil dengan Kesenian, untuk Mengelola Negara dan Pasar Lebih Baik”. Pidato Kebudayaan yang disampaikan di Graha Bakti Budaya, TIM, 10 November 2009.
- Latif, Yudie. “Requiem Dini, Krisis Finansial dan Krisis Demokrasi”. *Prisma*, No. 1, Vol. 28, Juni 2009.
- Magnis-Suseno, Frans. *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Soekarno. *Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno dimuka Hakim Kolonial*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Tanuredjo, Budiman. “Melongok Demokrasi Indonesia”, *Kompas*, 16 Agustus 2007.
- Wibowo, Setyo. “Kesetaraan Sebagai Presuposisi La Politique”. Makalah disampaikan pada diskusi buku *Demokrasi dan Kekecewaan* di Salihara, Pasar Minggu, 13 Mei 2009.
- _____. “Merenungkan makna sila ke-4: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Makalah disampaikan dalam kuliah Pancasila: Demokrasi, STF Driyarkara 11 November 2009.
- _____. “Irasional namun Efektif”, *Kompas*, 20 Januari 2009.

Web site:

- <http://www.pemiluindonesia.com/pemilihan-presiden/inilah-cacat-kpu-versi-tim-mega-pro.html> (diunduh pada 11 November 2009).
- <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22>. (diunduh pada 11 November 2009).